RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TABANAN

Jalan Wibisana No.4 Tabanan
Telp. (0361) 811220
Tabanan Bali

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas karuniaNya Penyusunan Rencana Kerja dapat disusun secara tepat waktu. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Rencana Kerja merupakan tahap awal dari setiap program dan kegiatan, karena itu tahap ini akan sangat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Visi dan Misi pimpinan daerah terpilih, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan menghadapi tantangan untuk memajukan Desa yang ada di Kabupaten Tabanan menuju Desa Mandiri.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, perencanaan atau pelaksanaan suatu kegiatan harus bisa seefisien mungkin dalam mengelola Anggaran Keuangan Daerah, sehingga rencana program yang sudah menjadi skala prioritas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.

Tabanan, 2 Agustus 2022

Kepala DPMD Kabupaten Tabanan,

Dra. I G.A.N. SUPARTIWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660128 198602 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan mengalami perubahan sejalan dengan Era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* yang ditandai dengan Penyelenggaraan Pemerintahan yang trasparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang merupakan amanah dari Undang–Undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, hal ini merupakan penegasan dari Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998. Perubahan ini mengharuskan Pemerintah untuk mewujudkan sistem Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah yang Demokratis, desentralistik yang berorientasi pada trasparansi dan akuntabilitas melalui control masyarakat. Tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *Good Governance,* adalah merupakan dambaan setiap warga Negara, Untuk mewujudkan hal tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor: 7 Tahun 1999, dan Inpres tersebut mewajibkan setiap Pejabat Eselon II keatas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal dalam mencapai *Good Governance,* yang hanya dalam tatanan wacana, dan untuk menyempurnakan hal tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 diterakan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, berupaya menyusun Perencanaan Strategis (Renstra), Renstra dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT yang telah mendapatkan persetujuan alokasi dana dipakai sebagai dasar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), RKA yang telah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional yaitu :
    - Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    - Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah;
    - Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
    - Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa;
    - Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
    - Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaam Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabpaten Tabanan Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efesiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan ”Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi” (Meneg PAN 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dicapai. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD
2. Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa, yang mengemban tugas pada masing-masing Bidang, yaitu ;

1. Bidang Pemerintahan Desa,
2. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,
3. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, dan
4. Bidang Keswadayaan Dan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat guna peningkatan kemandirian dan kesejahtraan di pedesaan.

Dari tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan.

Hasil rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tercermin dalam Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021, seperti tersaji dalam table II.1 berikut :

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(renstra perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Urusan Wajib Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
						Bidang Urusan : Pemberdyaan Masyarakat dan Desa									
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100**
						Penunjang Kegiatan DPMD Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	**100**
						Program peningkatan Srana dan Prasarana Aparatur	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**		**88 %**	**90 %**	**90 %**	**100 %**	100	**90**	**100**

						Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja						90 %	90 %	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya alat Sarana dan Prasarana Kantor yang layak dipakai						90 %	90 %	100
						Monitoring dan evaluasi Penggunaan dana hibah	Terverifikasi Terpantaunya Penggunaan Dana Hibah di Masyarakat								
						Rapat2 Koordinasi Dlm Rangka Monev Kegiatan di Desa	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Desa								
						Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh Bumdes		120 Kelompok	90 Kelompok	90 Kelompok	100 %			100
						Pelatihan kewirausahaan BUMDes	Terlatihnya pengurus BUMDes								
						Pelatihan Fasilitator dan Pendampingan Operasional Bumdes Dan Kelompok Pendampingnya	Terbentuknya Produk-produk unggulan BUMDes sesuai potensi desa		120 Bumdes	90 Bumdes	90 Bumdes	100 %			100
						Pembentukan Dan Pelatihan manajemen BUMDES Baru	Terbentuk dan Terlatihnya Pengurus BUMDes yg mampu mengelola potensi desa.								
						Revitalisasi pasar desa	Jumlah pasar desa yang direvitalisasi								
						Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang memiliki kapasitas aparatur pemerintah desa memadai		**133 desa**	**133 desa**	**133 desa**	**100 %**	**133 desa**	**133 desa**	**100**

						Pemilihan dan pelantikan Perbekel	Terpilih dan dilantiknya Perbekel se Kabupaten Tabanan		96 desa				22 desa		100
						Penyusunan Rancangan Peraturan yg terkait dgn Pemberdayaan	Terdapatnya payung hukum terhadap berbagai peraturan tentang desa								
						Bimtek Perbekel dan perangkat Desa	Terlatihnya Perbekel dan Aparat Desa								
						Pembinaan BPD	Terbinanya BPD se Kab.Tabanan								
						Pembinaan LPM	Terbinanya Kelompok LPM se Kab.Tabanan								
						Pembinaan Kerjasama Desa dan Kemitraan	Terbinanya Kerjasama Desa dan Kemitraan		28 desa						
						Program peningkatan pengelolaan pemerintahan desa	Persentase Desa yang mendapatkan penilaian baik atas kinerja keuangan		**70 %**	**80 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**		
						Evaluasi dan klarifikasi Perda dan Perdes	Jumlah Perda dan Perdes yang siap dievaluasi dan diklarivikasi								
						Penyusunan profil desa	Jumlah desa dlm katagori desa mandiri		27 desa	28 desa	28 desa	100 %			
						Pola tata desa	Jumlah kawasan strategis yg memiliki dokumen tata ruang		7 dokumen						
						Pembinaan pengelolaan keuangan Desa	Jumlah desa dlm katagori desa mandiri		133 desa	133 desa	133 desa	100 %			
						Sistem Keuangan Desa	Adanya dokumen APBDesa yg berbasis aplikasi siskeudes		133 desa						
						Bimtek aplikasi Siskeudes	Jumlah Desa yang memahami tentang Aplikasi Siskeudes								

						Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	**Jumlah desa berprestasi minimal tingkat propinsi**		**1 desa**	**1 desa**	**1 desa**	**100 %**	**1 desa**		
						Pembinaan dan penyelenggaraan lomba desa	Terbinanya 20 Desa untuk mengikuti Lomba Desa		20 desa	20 desa	20 desa	100 %			
						Revitalisasi dan operasional Posyandu	Meningkatnya jumlah Posyandu dan Kader posyandu yang terbina		65 orang						
						PMT-AS	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan makanan tambahan yg sehat		167 orang	188 orang	188 orang	100 %			
						Pembinaan PKK	Meningkatnya pengetahuaan kader PKK serta terlatihnya kader PKK								
						Penunjang kegiatan PKK	Terlaksananya lomba 10 program Pokok PKK di Kab dan terwakilinya Kab. Dalam lomba Tingkat Provinsi		30 desa	30 desa	30 desa	100 %			
						TMMD dan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	Terbinanya KK miskin untuk peningkatan ekonomi keluarga		1 desa	1 desa	1 desa	100 %			
						Lomba Desa dlm rangka Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan di Desa		1 desa						
						Pendataan swadaya murni masyarakat	jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan fasilitas desa dalam setahun		3 desa						
						Aplikasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok TTG yg terbina		10 kelompok	10 kelompo	10 kelompo	100 %	10 Kelompok		

									k	k			
						Posyantek	Tersedianya Informasi Posyantek		10 Kecamatan				

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(renstra perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Urusan Wajib Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
						Bidang Urusan : Pemberdyaan Masyarakat dan Desa									
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah**	**100%**	**-**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Sakip	2 Dok	-	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	**100**

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah*	*1 dok*	-	*1 dok*	*1 dok*	100	*1 dok*	*1 dok*	**100**
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia*	*1 dok*	-	*1 dok*	*1 dok*	100	*1 dok*	*1 dok*	100
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	-	100 %	100 %	100	100 % %	100 %	100
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Persentase terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN*	*100 %*	-	*100 %*	*100 %*	100	*100 %*	*100 %*	100
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	*Buku Laporan Asset*	*2 jenis*	-	*2 jenis*	*2 jenis*	100	*2 jenis*	*2 jenis*	100
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*	*100%*	-	*100%*	*100%*	100	*100%*	*100%*	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	*100%*	-	*100%*	*100%*	100	*100%*	*100%*	100
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*100%*	-	*100%*	*100%*	100	*100%*	*100%*	100
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor*	*100%*	-	*100%*	*100%*	100	*100%*	*100%*	100
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan*	*100%*	-	*100%*	*100%*	100	*100%*	*100%*	100

							Perundang-Undangan								
						Penyediaan Bahan/Material	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor*	*100%*	-	*100%*	*100%*	100	*100%*	*100%*	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah*	*100%*	-	*100%*	-	-	*100%*	*100%*	100
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		-				100%	100%	100
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor*		-				*100%*	*100%*	100
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Tersedianya Gedung Bangunan Tempat Kerja*		-						
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	100%	-	100%	100%	100	*100%*	*100%*	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*100%*	-	100%	100%	100	100%	100%	100
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*	*100%*	-	100%	100%	100	100%	100%	100
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional*	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*	-	-	-	-	-	-	-	-
						PROGRAM PENATAAN DESA	***Persentase Desa Tertib Hukum***	**20%**	-	-	-	-	**20%**	**20%**	100
						Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terselenggaranya Penataan Desa	20%	-	-	-	-	20%	20%	100
						Fasilitasi Tata Wilayah Desa	*Persentase Terfasilitasinya Tata Wilayah Desa*	*20%*	-	-	-	-	*20%*	*20%*	100
						Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	*Persentase Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa*	*20%*	-	-	-	-	*20%*	*20%*	100
						Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	*Persentase Terfasilitasinya Penamaan dan Kode Desa*	*20%*	-	-	-	-	*20%*	*20%*	100
						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	*Persentase Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa*	*20%*	-	-	-	-	*20%*	*20%*	100
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Tertib Administrasi**	**100%**	-	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	100
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
						Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik*	*133 Desa*	-	*133 Desa*	*133 Desa*	100	-	-	-

						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Tersedianya Produk Hukum*	-	-	-	-	-	-	-	-
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Tersedianya Dokumen RPJMDes , RKPDes*	*133 Desa*	-	*133 Desa*	*133 Desa*	100	-	-	-
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Tersedianya Laporan Keuangan Desa*	-	-	-	-	-	*133 Desa*	*133 Desa*	100
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*	-	-	-	-	-	-	-	-
						Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa*	-	-	-	-	-	*133 Desa*	*133 Desa*	100
						Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	*Tersedianya Perdes yang Menjadi Kewenangan Desa*	-	-	-	-	-	-	-	-
						Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	*Terbinanya BUM Desa*	*10 Kecamatan*	-	*10 Kecamatan*	*10 Kecamatan*	100	*10 Kecamatan*	*10 Kecamatan*	100
						Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Terpilihnya kepala desa sesuai peraturan yang berlaku*	-	-	-	-	-	*14 Desa*	*14 Desa*	100
						Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	*Tersedianya dokumen profil desa*	-	-	-	-	-	*133 Desa*	*133 Desa*	100
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	*Tersedianya dokumen aset desa*	-	-	-	-	-	*133 Desa*	*133 Desa*	100
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	*Meningkatnya kapasitas BPD*	-	-	-	-	-			-
						Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	*Tersedianya laporan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku*	-	-	-	-	-	*133 Desa*	*133 Desa*	100
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Tersedianya dokumen lomba desa sesuai peraturan yang berlaku*	-	-	-	-	-	*10 Desa*	*10 Desa*	100
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa**	**100%**	-	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**

						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan	133 Desa	-	133 Desa	133 Desa	**100**	133 Desa	133 Desa	**100**
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Meningktanya Pengetahuan Kader PKK tentang 10 Program Pokok PKK dan Laporan Hasil TMMD*	*10 Kecamatan*	-	*10 Kecamatan*	*10 Kecamatan*	100	-	-	-
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Posyandu yang Dibina*	*133 Desa*	-	*133 Desa*	*133 Desa*	100	*133 Desa*	*133 Desa*	100
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	*Menurunnya Angka Kemiskinan di Desa*	*133 Desa*	-				*133 Desa*	*133 Desa*	100
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Kelompok TTG yang Terbina*	*10 Kecamatan*	-	*10 Kecamatan*	*10 Kecamatan*	100	*10 Kecamatan*	*10 Kecamatan*	100
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Persentase Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	-	-				*10 Kecamatan*	*10 Kecamatan*	100

						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	*Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa*	-	-				*10 Kecamatan*	*10 Kecamatan*	100
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	-	-				*10 Kecamatan*	*10 Kecamatan*	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Sekretaris membawahi :
   2.1. Kepala Sub Bagian Umum
   2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
4. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi;
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan;
6. Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan;
7. UPTD Dinas;
8. Jabatan Fungsional

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Pokoknya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas;

a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan desa;

c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi kerja sama antar desa

d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat

yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten;

f. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas;

a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;

c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;

e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;

f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;

g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;

h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;

i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;

j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;

k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja subbagian umum;

b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja sub bagian keuangan;
b. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
f. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. **Kepala Bidang Pemerintahan Desa**

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemerintahan desa;
b. penyusunan program kerja lingkup bidang pemerintahan desa;
c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
d. fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
e. fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
f. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
g. fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
h. pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
i. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
j. fasilitasi evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
k. pembinaan dan pemberdayaan bum desa dan lembaga kerja sama antar desa;
l. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
m. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
n. fasilitasi penyusunan profil desa;
o. fasilitasi manajemen pemerintahan desa;
p. fasilitasi pengelolaan aset desa;
q. pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
r. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
s. fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
t. pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
u. fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;
v. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan desa; dan

w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penataan desa;
b. penyusunan program kerja lingkup bidang penataan desa;
c. pelaksanaan kegiatanpenyelenggaraan penataan desa;
d. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
e. fasilitasi tata wilayah desa;
f. fasilitasi penataan kewenangan desa;
g. fasilitasi penamaan dan kode desa;
h. fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten;
i. fasilitasi sarana dan prasarana desa;
j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan desa; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas:

a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemberdayaan kawasan perdesaan;
b. penyusunan program kerja lingkup bidang pemberdayaan kawasan perdesaan;
c. pelaksanaan kegiatanfasilitasi kerja sama antar desa;
d. fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten;
e. fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten;

f. fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan kawasan perdesaan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan

Kepala Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan;
b. penyusunan program kerja lingkup bidang keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan;
c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten;
d. identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
e. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
f. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
g. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
h. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;

i. fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;

j. fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;

k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;

l. fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

m. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Terkait dengan struktur organisasi yang dimiliki Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsinya adalah :

1. KEDUDUKAN

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK

   Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

3. FUNGSI

   Dari tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

   b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun analisis pencapaian kinerja dari Program / Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan tahun 2021, yaitu seperti dalam Tabel II.2 yaitu :

Tabel II.2

PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	11	12	13
1	*Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah*			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
2	*Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia*			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
3	*Persentase terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN*			*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100%*	*100%*	*100 %*	*100%*	*100%*	
4	*Buku Laporan Asset*			*2 jenis*	*2 jenis*	*2 jenis*	*2 jenis*	*2 jenis*	*2 jenis*	*2 jenis*	*2 jenis*	*2 jenis*	
5	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
6	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
7	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
8	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
9	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
10	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
11	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%		100%	100%	

12	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	-	-	100%	
13	*Tersedianya Gedung Bangunan Tempat Kerja*								100%				
14	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
15	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
16	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
17	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional*			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	
18	*Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*						100 %	100%	100%				
19	*Persentase Terfasilitasinya Tata Wilayah Desa*				20%	20%	20%	22%	100%			20%	
20	*Persentase Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa*				20%	20%	20%	22%	100%			20%	
21	*Persentase Terfasilitasinya Penamaan dan Kode Desa*				20%	20%	20%	22%	100%			20%	
22	*Persentase Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa*				20%	20%	20%	22%	100%			20%	
23	*Jumlah Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik*			133 Desa	133 Desa					133 Desa	133 Desa		
24	*Tersedianya Produk Hukum*						133 Desa	133 Desa	133 Desa				
25	*Tersedianya Dokumen RPJMDes , RKPDes*			133 Desa	133 Desa		133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa		
26	*Tersedianya Laporan Keuangan Desa*					133 Desa	133 Desa		133 Desa			133 Desa	

27	*Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*						133 Desa		133 Desa				
28	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa*					133 Desa	133 Desa		133 Desa			133 Desa	
29	*Tersedianya Perdes yang Menjadi Kewenangan Desa*						133 Desa		133 Desa				
30	*Terbinanya BUM Desa*			10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.		10 Kec.	10 Kec	10 Kec	10 Kec.	
31	*Terpilihnya kepala desa sesuai peraturan yang berlaku*					14 Desa		97 Desa				14 Desa	
32	*Tersedianya dokumen profil desa*					133 Desa	133 Desa		133 Desa			133Desa	
33	*Tersedianya dokumen aset desa*					133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa			133Desa	
34	*Meningkatnya kapasitas BPD*						133 Desa	133 Desa	133 Desa				
35	*Tersedianya laporan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku*					133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa			133Desa	
36	*Tersedianya dokumen lomba desa sesuai peraturan yang berlaku*					10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa			10 Desa	
37	*Meningktanya Pengetahuan Kader PKK tentang 10 Program Pokok PKK dan Laporan Hasil TMMD*			10 Kec.	10 Kec.					10 Kec.	10 Kec.		
38	*Jumlah Posyandu yang Dibina*			133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	
39	*Menurunnya Angka Kemiskinan di Desa*			133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa	133 Desa		133 Desa	133 Desa	

40	*Jumlah Kelompok TTG yang Terbina*			10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	
41	*Persentase Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*					10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.			10 Kec.	
42	*Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa*					10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.			10 Kec.	
43	*Persentase Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*					10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.			10 Kec.	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kebijakan Pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pembangunan di daerah mutlak harus ditingkatkan, dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dijelaskan dalam PP No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan yang bersifat khusus ini memberi gambaran bahwa Desa merupakan bagian integral yang harus dibangun secara optimal dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat guna peningkatan kemandirian dan kesejahtraan di pedesaan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yaitu ”Pemulihan Ekonomi Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani” yang memiliki makna serangkaian program/kegiatan pembangunan yang dirancang dalam rangka memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan menerapkan Visi Tabanan. Jika dikaitkan dengan isu-isu strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dapat disampaikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu :

a. Lemahnya kompetensi perangkat desa,
b. Belum optimalnya lembaga ekonomi desa,
c. Rendahnya partisipasi masyarakat

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan melaksanakan kegiatan teknis yang sering langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan.

Tabel II.3
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Desa**	**100%**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Renja dan Sakip**	**2 Dokumen**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia	1 Dokumen	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**	**100%**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tabanan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kabupaten Tabanan	Buku Laporan Asset	2 Jenis	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**	**100%**	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	

3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100%	
3.5	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**	**100%**	
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tabanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**	**100%**	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**	**100%**	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	

II	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Desa Tertib Hukum**	**20%**	
1.	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		**Persentase Terselenggaranya Penataan Desa**	**20%**	
1.1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Tabanan	Persentase Terfasilitasinya Tata Wilayah Desa	20%	
1.2	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Tabanan	Persentase Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa	20%	
1.3	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Tabanan	Persentase Terfasilitasinya Penamaan dan Kode Desa	20%	
III	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Desa Tertib Administrasi**	**100 %**	
1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa yang Dibina**	**100 %**	
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	133 Desa	
1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	133 Desa	
1.3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Kabupaten Tabanan	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi yang Difasilitasi Oleh BUM Desa	10 Kecamatan	
1.4	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Tabanan	Terpilihnya kepala desa sesuai peraturan yang berlaku	14 Desa	
1.5	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Tabanan	Tersedianya dokumen profil desa	133 Desa	
1.6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Tabanan	Tersedianya dokumen aset desa	133 Desa	
1.7	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Tabanan	Tersedianya laporan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku	133 Desa	
1.8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Tabanan	Tersedianya dokumen lomba desa sesuai peraturan yang berlaku	10 Desa	

III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa**	**100 %**	
1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan**	**133 Desa**	
1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Tabanan	Jumlah Posyandu yang dibina	133 Desa	
1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Tabanan	Menurunnya Angka Kemiskinan di Desa	133 Desa	
1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Tabanan	Jumlah Kelompok TTG yang Terbina	10 Kecamatan	
1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Tabanan	Persentase Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10 Kecamatan	
1.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kabupaten Tabanan	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	10 Kecamatan	
1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Tabanan	Persentase Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Kecamatan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang dibuat secara lengkap dan komprehensif yang memuat tata cara Pemerintah Kabupaten Tabanan mencapai tujuan dan sasaran. Strategi pembangunan daerah dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan agar memiliki fokus dan target dalam pelaksanaannya lima tahun kedepan. Agenda pembangunan Tabanan sebagai tindak lanjut penanganan isu-isu strategis daerah terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran setiap misi dari Kepala Daerah terpilih.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efesiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan ”Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi” (Meneg PAN 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dicapai. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD
2. Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg. PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun perumusan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan beserta indikatornya dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.1

Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2	Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Swadaya Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Mengacu kepada sasaran tersebut diatas, maka Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan sebagai penjabaran dari tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**11.658.169.100,-**				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**		**100%**	**8.845.182.500,-**			**100%**	**9.386.056.550**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Renja dan Sakip**		**2 Dokumen**	**5.000.000,-**			**2 Dokumen**	**5.000.000,-**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	3.000.000 ,-			1 Dokumen	3.000.000 ,-

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	2.000.000,-			1 Dokumen	2.000.000,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**		**100%**	**5.611.583.000,-**			**100%**	**6.153.000.000,-**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	41 Orang	5.608.583.000,-			41 Orang	6.150.000.000,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semestaran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semestaran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	12 Laporan	3.000.000,-			12 Laporan	3.000.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**		**100%**	**79.998.900,-**			**100%**	**80.000.000,-**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Paket	2.499.500,-			4 Paket	2.500.000,-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Paket	1.000.000,-			4 Paket	1.000.000,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua	12 Paket	24.163.400,-			12 Paket	25.000.000,-

	yang disediakan	kelurahan						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Paket	5.000.000,-			4 Paket	5.000.000,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan					12 Dokumen	1.500.000,-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	4 Paket	20.000.000,-			4 Paket	20.000.000,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	3 Laporan	27.336.000,-			3 Laporan	25.000.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**		**100%**	**159.673.800,-**			**100%**	**45.385.000,-**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	10 Unit	159.673.800,-			10 Unit	45.385.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**		**100%**	**2.963.931.800,-**			**100%**	**2.973.056.550,-**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	2 Laporan	2.000.000,-			2 Laporan	2.000.000,-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	12 Laporan	15.000.000,-			12 Laporan	15.000.000,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	12 Laporan	2.946.931.800,-			12 Laporan	2.956.056.550,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**		**100%**	**24.995.000,-**			**100%**	**25.000.000,-**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	15 Unit	24.995.000,-			15 Unit	25.000.000,-
PROGRAM PENATAAN DESA	***PERSENTASE DESA TERTIB HUKUM***		**20%**	**30.000.000,-**			**20%**	**1.030.000.000,-**
Penyelenggaraan Penataan Desa	**Persentase Terselenggaranya Penataan Desa**		**20%**	**30.000.000,-**			**20%**	**1.030.000.000,-**
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	94 Desa	10.000.000,-			94 Desa	10.000.000,-
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	27 Desa	10.000.000,-			27 Desa	10.000.000,-
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua	133 Desa	10.000.000,-			133 Desa	10.000.000,-

	penamaan dan kode desa	kelurahan						
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan					1 Paket	1.000.000.000,-
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Tertib Administrasi**		**100%**	**1.183.956.600,-**			**100%**	**54.258.500,-**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang dibina**		**100%**	**1.183.956.600,-**			**100%**	**54.258.500,-**
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	500.000.000,-			1 Dokumen	500.000.000,-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Dokumen	80.000.000,-			133 Dokumen	5.000.000,-
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Laporan	10.000.000,-			133 Laporan	5.000.000,-
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	77.000.000,-			1 Dokumen	5.000.000,-
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	14 Laporan	106.956.600,-			-	-
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Dokumen	5.000.000,-			133 Dokumen	10.000.000,-

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Dokumen	100.000.000,-			133 Dokumen	10.000.000,-
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	133 Desa	5.000.000,-			133 Desa	5.000.000,-
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	10 Dokumen	300.000.000,-			10 Dokumen	10.000.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa**		**100%**	**1.599.030.000,-**			**100%**	**163.800.900,-**
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan**		**133 Desa**	**1.599.030.000,-**			**133 Desa**	**163.800.900,-**
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua	63 Lembaga	25.000.000,-			63 Lembaga	25.000.000,-

Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	kelurahan						
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	10.000.000,-			1 Dokumen	10.000.000,-
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	50.000.000,-			1 Laporan	13.000.000,-
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	10.000.000,-			1 Laporan	10.000.000,-
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	4.030.000,-			1 Dokumen	5.800.900,-

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	10 Dokumen	1.500.000.000,-			10 Dokumen	100.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Target Kinerja 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan pada Tahun 2023 Rencana Kinerja Tahunan disusun setiap tahun dimana RKT memuat informasi tentang :

a. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
b. Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

4.2 Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2023

Pencapaian Target Kinerja yang ditentukan di Tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik, sehingga dapat menjawab tatangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2023 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023	
		Target	Rp
1	2	3	4
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**10.358.365.000,-**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**9.122.385.000,-**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Renja dan Sakip**	**2 Dokumen**	**5.000.000,-**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000 ,-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**	**100%**	**5.611.583.000,-**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	5.608.583.000,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestaran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestaran SKPD	12 Laporan	3.000.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**	**100%**	**79.998.900,-**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	2.499.500,-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	1.000.000,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	24.163.400,-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	5.000.000,-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	4 Paket	20.000.000,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	27.336.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**	**100%**	**159.673.800,-**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	159.673.800,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan**	**100%**	**2.963.931.800,-**

	fungsi PD		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000,-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.946.931.800,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD**	**100%**	**24.995.000,-**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	24.995.000,-
PROGRAM PENATAAN DESA	***PERSENTASE DESA TERTIB HUKUM***	**20%**	**30.000.000,-**
Penyelenggaraan Penataan Desa	**Persentase Terselenggaranya Penataan Desa**	**20%**	**30.000.000,-**
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	94 Desa	10.000.000,-
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	27 Desa	10.000.000,-
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa	133 Desa	10.000.000,-
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Tertib Administrasi**	**100%**	**1.183.956.600,-**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang dibina**	**100%**	**1.183.956.600,-**
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	500.000.000,-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	133 Dokumen	80.000.000,-
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	133 Laporan	10.000.000,-
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	1 Dokumen	77.000.000,-
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	14 Laporan	106.956.600,-
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	133 Dokumen	5.000.000,-
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	133 Dokumen	100.000.000,-
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	133 Desa	5.000.000,-
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	300.000.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa**	**100%**	**1.599.030.000,-**
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan**	**133 Desa**	**1.599.030.000,-**
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	63 Lembaga	25.000.000,-

Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	10.000.000,-
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,-
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,-
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	4.030.000,-
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	1.500.000.000,-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan penilaian kegiatan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Sehingga Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan menjadi lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Bupati yang salah satunya akan terjewantahkan dalam bentuk peningkatan pelayanan masyarakat didalam mewujudkan Desa Mandiri.

Tabanan, 2 Agustus 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabanan

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dra. I G.A.N. SUPARTIWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660128 198602 2 003